

Surat Kabar : KOMPAS

Edisi : 12 Desember 2014

Subyek : Perambahan

Hal : 23

PERAMBAHAN : PROSES HUKUM TETAP DIKESAMPINGKAN

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat tetap akan mengesampingkan penindakan hukum terkait dugaan perambahan cagar alam oleh oknum pegawai negeri sipil Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penindakan hukum akan mereka ambil jika aparat negara itu kembali melakukan perambahan.

Kepala Satuan Polisi Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat Zulmi Gusrul, di Padang, Kamis (11/12), kembali menegaskan, Pemerintah Kabupaten Agam meminta agar penegakan hukum tak diambil kepada oknum PNS itu. Sebab, saat diperiksa, para oknum PNS mengaku tidak tahu. Keputusan itu juga atas hasil musyawarah dengan berbagai pihak.

Sembilan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, diduga terlibat perambahan Cagar Alam Maninjau Utara Selatan seluas 40 hektar dan menjadikannya perkebunan kelapa sawit. Kegiatan itu berlangsung sejak tahun 2006, dari semula beberapa hektar, kemudian meluas menjadi 202 hektar. Para PNS itu memiliki sekitar 40 hektar dan sisanya milik warga (Kompas, 10/12).

Menurut Zulmi, alasan ketidaktahuan mereka sulit diterima. Apalagi, ada dugaan, satu dari sembilan oknum PNS itu pernah bertugas di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Agam. Meskipun demikian, katanya, BKSDA Sumbar memutuskan untuk tidak mengambil langkah hukum. Apalagi, oknum PNS itu berjanji tidak mengulangi perambahan. Di sisi lain, tidak ditemukan juga kerusakan pada biota, tanaman khas, atau konflik yang muncul antara satwa dan manusia sebagai dampak perambahan.

"Setelah dibuatkan berita acara pemeriksaan di lapangan, kemarin, oknum PNS tersebut juga membuat pernyataan mengakui itu lahan mereka dan bersedia meninggalkannya. Mereka juga memastikan tidak ada penyerahan lahan ke oknum atau masyarakat lain. Namun, jika nantinya mereka menghalangi kami atau mengulangi lagi, kami tidak akan segan-segan membawanya ke proses hukum," kata Zulmi.

Zulmi menambahkan, untuk lahan yang diduga dirambah masyarakat setempat, pemusnahan tetap akan dilakukan secara bertahap.

Meskipun kecewa dengan ketidaktegasan BKSDA Sumbar, Deputy Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat Desriko Malayu Putra meminta lembaga itu serius pada pengembalian fungsi lahan. "Kalaupun tidak menindak, mereka harus bisa memaksimalkan peran masyarakat perambah untuk memulihkan lokasi itu. Setelah sekian tahun merambah, masyarakat bisa menyadari, mereka punya tanggung jawab di sana," katanya. (ZAK).